

“POST CONSTRUCTION CENSUS AND CAPACITY BUILDING” WSLIC 2 - H1

Keberlanjutan Akses Air Bersih dan Sanitasi di desa

Keberpihakan pada perempuan dan masyarakat miskin ditunjukkan secara nyata dan terukur yaitu setiap pertemuan maupun kepengurusan harus ada partisipasi dan keterwakilan mereka sebesar 30%. Dan kewajiban kontribusi masyarakat sebesar 20% (16% material/tenaga dan 4% uang) untuk kegiatan maupun pembangunan dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Kebijakan ini tidak bisa ditawarkan dalam rangka memastikan terjadinya keberlanjutan akses air bersih dan sanitasi.

WSLIC-2 juga mengenalkan nilai baru air, “air bukan benda sosial melainkan benda ekonomi”. Nilai ini telah mampu membuat masyarakat lebih menghargai air secara terukur (adanya kesadaran memasang meteran air yang dikelola oleh lembaga pengelola air bersih) dan kompromi ada pada harga per meter kubik air. Dampaknya tidak ada air yang mengucur dari kran terus menerus terbuang percuma dan tersedianya biaya untuk perawatan dan pengembangan sarana air bersih dan sanitasi, bahkan beberapa desa mampu membiayai sarana/infrastruktur desa lainnya (jalan, subsidi pelayanan posyandu dll). Apakah semua desa WSLIC-2 mampu seperti ini..hanya sedikit yang tidak bisa berkembang yaitu desa-desa dengan sarana air bersih non perpipaan (sumur gali, penampung air hujan) yang relatif diurus secara individu meskipun telah. Masyarakat tidak berkeberatan membayar sepanjang kualitas pelayanan air bersih memadai dan pengelola transparan dalam mengelola keuangannya. Meskipun berpihak pada kelompok miskin tetapi layanan air bersih dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat (menengah dan kaya) ternyata mampu mendukung kapasitas lembaga pelayanan air bersih dan sanitasi.

Peningkatan akses air bersih adalah upaya mendekatkan masyarakat dengan sumber air dengan demikian waktu produktif diharapkan meningkat. Makin dekatnya sumber air bersih di tengah pemukiman juga berdampak pada timbulnya genangan-genangan air yang apabila tidak ditangani dengan saluran/instalasi pembuangan air limbah dapat menimbulkan masalah baru kesehatan. Sementara waktu masih belum berdampak signifikan karena permukaan tanah yang masih luas di desa akan tetapi perilaku ini merupakan tantangan baru untuk diselesaikan.

Keberlanjutan upaya mandiri masyarakat desa memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi lebih nampak nyata pada desa-desa dengan sarana air bersih perpipaan (gravitasi dan pompa)

Pentingnya kerjasama lintas sektor

Lintas sektor pemerintah kabupaten yang berpikir cenderung sporadis dan berjalan sendiri-sendiri bahkan sampai munculnya ego sektoral, terjadi akibat rendahnya tingkat komunikasi antar lintas sektor. Melalui kegiatan capacity building pemerintah kabupaten diharapkan persoalan mendasar yang sering terjadi ini dapat dikurangi.

Metode pertemuan-pertemuan antar lintas sektor menjadi pilihan dan akhirnya menyadari bahwa apa yang dilaksanakan selama ini oleh masing-masing sektor bukanlah hal yang beda tetapi sejatinya sama. Sama-sama ingin memastikan masyarakat desa mempunyai lingkungan dan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Berbeda pada apa pendekatannya yaitu fokus pada sarananya, fokus pada kelembagaanya, fokus pada perilakunya, fokus pada sasarannya (laki-laki perempuan, anak dan dewasa).

Pemerintah pusat telah menstimulasi keberlanjutan upaya mandiri pemerintah kabupaten melalui peningkatan kapasitas aparat dalam berpikir strategis, dalam mengembangkan akses air bersih dan sanitasi di masyarakat. Hal ini terlihat dari kabupaten-kabupaten telah menyusun renstra AMPL dan mengalokasikan biaya bagi operasionalisasi pokja AMPL sebagai motor penggerak komunikasi lintas sektor sehingga upaya-upaya masing-masing sektor meskipun terpisah tetapi terpadu.